

ANATOMI KONFLIK SOSIAL DI JAWA TENGAH: Studi Kasus Konflik Penistaan Agama di Temanggung

Fitriyah dan Dzunuwanus Ghulam Manar

Abstract

SARA (Indonesian acronym of suku/tribe, agama/religion, ras/race and antargolongan/intergroup) conflict is always happened due to the community diversity in Indonesia. Understanding SARA conflict using tool of analysis is important to investigate and propose solution in order to maintain harmony. Using case study of religious insult in Temanggung, Central Java Province, this research analyzes the conflict using DFID framework in order to determine structure, actors, and dynamics of the conflict that is important for conflict resolution.

Keywords: conflict, religious insult, structure, actors, dynamics.

A. PENDAHULUAN

Dalam ilmu politik konflik merupakan topik yang menarik karena konflik adalah realitas sosial yang melekat dalam diri manusia dan sudah barang tentu dapat dikaji dan dipelajari dengan konteks dan area yang beragam. Ilmu Politik akan berfokus kepada konflik domestik/dalam negeri serta internasional. Hal ini akan berbeda dibandingkan dengan Ilmu Ekonomi yang mengkaji tentang *game theory* dan pembuatan keputusan, Psikologi dengan konflik interpersonal serta Sosiologi dengan konflik status dan kelas sebagai pusat kajiannya. Meski pada dasarnya mengangkat manifestasi konflik yang relatif sama namun bisa jadi konteks, fokus dan area kajiannya menjadi berbeda. Dengan demikian mengkaji dan mempelajari perselisihan, debat, cekcok, berbantahan, ketegangan bahkan sampai dengan adu fisik bahkan penggunaan kekerasan oleh militer dapat dilakukan oleh disiplin ilmu manapun dengan pendalaman yang berbeda-beda.

Di Indonesia, konflik dengan level regional-nasional telah muncul sejak tahun 1920-1940an. Konflik tersebut berkaitan dengan upaya untuk meletakkan dasar negara yang kokoh dan menjadi konflik di antara golongan nasionalis, agama maupun komunis yang sama-sama ingin memberi warna dan dominasi pada negara yang akan terbentuk kelak (Bertrand, 2004: 28-32).

Pada era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, konflik pada level nasional berkisar kepada membangun pemerintahan baru yang kadang upaya yang diputuskan oleh Pemerintah Republik Indonesia (pemerintah pusat) tidak memuaskan atau malah merugikan daerah-daerah (Bertrand, 2004: 28-32). Manifestasi konflik ini terlihat dari berbagai pemberontakan dan pembentukan dewan-dewan di beberapa wilayah, seperti di Sumatera dan Sulawesi sebagai bentuk protes dan ketidaksetujuan atas kebijakan pemerintah pusat.

Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto, konflik yang terjadi hampir mirip dengan masa Orde Lama, yakni berpusat pada hubungan pusat (Jakarta) dan daerah dengan isu-isu ekonomi yang lebih dominan, seperti eksploitasi alam dan redistribusi yang kurang adil/timpang. Beberapa wilayah seperti Aceh, Timor-Timur dan Papua juga mengusung isu pemisahan diri sebagai bentuk ancaman atas perilaku tamak pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya alam dan ekonomi, khususnya Aceh dan Papua.

Di luar konflik yang telah disebutkan di atas, pada masa Orde Baru juga diwarnai dengan konflik SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), sebagaimana yang terjadi di Kalimantan Tengah dan Barat, yakni konflik antarsuku Dayak dan Madura; Maluku dan Poso, yakni konflik Islam-Kristen; konflik yang terjadi di

beberapa kota besar di Indonesia, termasuk kekerasan Mei 1998 di Jakarta, Solo dan Medan antara pribumi dan etnis cina serta berbagai konflik antarkelompok, seperti antarpremen, antara tentara dan sipil maupun tentara dan polisi (Bertrand, 2004: 28-32).

Konflik SARA memiliki makna yang istimewa bagi Indonesia karena pada dasarnya Indonesia yang terpapar dari Sabang sampai Merauke memiliki potensi konflik yang sangat besar mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, agama, golongan dan kepentingan. Kegagalan untuk mengelola perbedaan akan menjadi sebuah konflik yang menghabiskan sumber daya yang luar biasa guna menanggulangi berbagai bentuk manifestasi konflik seperti permusuhan yang berkesinambungan, perang antarsuku/golongan, kerusuhan, prasangka dan perasaan superioritas atas kelompok lain yang pada akhirnya akan mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia.

Meski pemerintah dengan dibantu organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil serta para tokoh telah berupaya meminimalisasikan konflik SARA, namun demikian dalam kenyataannya masih saja terjadi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 8 Februari 2011, yakni konflik yang dimulai dari tindakan penistaan agama.

Kasus Temanggung ini sangat menarik untuk diteliti guna menggali lebih dalam mengenai konflik yang terjadi. Dengan melakukan analisis konflik menggunakan pendekatan DFID yang dimodifikasi diharapkan akan dapat menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yakni :

1. Bagaimana anatomi konflik sosial di Temanggung?
2. Siapa saja aktor yang terlibat, apa kepentingannya dan faktor apa saja yang dapat memicu ataupun menghentikan konflik?
3. Apa saja skenario yang mungkin dilaksanakan berkaitan dengan konflik SARA berupa penistaan agama?

A.1. Tujuan Penelitian

Selain guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Memetakan anatomi konflik sosial guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan struktur konflik yang terjadi.
2. Mendapatkan pemahaman yang lebih baik berkaitan dengan pemicu dan pengubah konflik (dari laten menjadi terbuka) dengan fokus kepada beberapa variabel, seperti:
 - a. Struktur (analisa konteks, sumber ketegangan/konflik, kunci utama konflik).
 - b. Aktor-aktor yang relevan (orang, badan, lembaga).
 - c. Dinamika konflik (analisa peluang jangka panjang dan jangka pendek, analisa pemicu eskalasi konflik, faktor-faktor yang mempercepat atau menghambat konflik serta skenario yang mungkin dilaksanakan pada masa mendatang).
3. Memberikan bahan rekomendasi bagi pemerintah dan *stakeholder* lain berkaitan dengan pola-pola antisipasi, penanganan dan penanggulangan konflik SARA.

Kerangka analisa yang digunakan sebagaimana tersebut di atas merupakan modifikasi dari alat analisis yang biasa dilakukan oleh DFID (*The Department for International Development*), yakni sebuah lembaga pemerintah Inggris yang memiliki tugas pokok untuk ikut berpartisipasi dan berinisiasi mencapai *Millenium Development Goals (MDGs)* dengan memberikan bantuan dan bimbingan kepada negara-negara miskin di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Kerangka analisa konflik ini lebih bersifat praktis, operasional serta mudah dipahami untuk konflik

antarkelompok/komunitas pada sebuah negara. Dengan pengalaman selama 14 tahun melakukan advokasi konflik di Afrika, alat ini banyak dipakai oleh para peneliti yang berupaya untuk melakukan pemetaan atas sebuah konflik. Sudah barang tentu harapannya agar sebuah konflik bisa dipahami secara lebih mendalam, dianalisis dan dapat dicari formula tepat untuk penyelesaiannya.

A.2. Rangkuman Kajian Teoritik

Konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari ketika terjadi perbedaan antarindividu dan antargolongan berkaitan dengan distribusi kelangkaan sumber daya, nilai-nilai maupun akses terhadap kekuasaan. Konflik terjadi karena manusia saling berhubungan setiap saat untuk bersama-sama meraih tujuan masing-masing. Manakala terdapat upaya-upaya yang berlawanan dalam meraih tujuan tersebut, misalnya ketersediaan sumber daya yang terbatas untuk diperebutkan oleh banyak orang maka konflik akan mengemuka dengan segala manifestasinya.

Suka tidak suka kondisi semacam itu akan melahirkan konflik dalam bentuk pertentangan, perseteruan, permusuhan bahkan bisa jadi menjurus kepada upaya-upaya fisik untuk menjaga agar pihak lain tidak memperoleh tujuannya. Pemahaman atas konflik sebagai bentuk pertentangan antarindividu dan antargolongan terjadi karena adanya perbedaan tujuan, bahkan mungkin berlawanan atas sumber yang terbatas atau tujuan yang berbeda.

Secara lugas Boulding menyatakan bahwa konflik adalah sebuah perjuangan atas nilai-nilai dan klaim atas status yang terbatas, kekuasaan serta sumber daya (Jeong, 2008: 5). Dalam konteks ini perjuangan yang dilakukan menjadi semakin hebat manakala tidak ada aturan yang disepakati bersama sebagai aturan main untuk menjamin kesetaraan alokasi dan kesempatan. Bisa jadi benturan perjuangan antarpihak menimbulkan kerusuhan, *chaos*, bahkan model *zero sum game* atau perjuangan habis-habisan. Konflik yang demikian justru merusak tata nilai dan norma hubungan antarindividu dan antarorganisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh definisi klasik yang diusung oleh Coser, bahwa konflik selain perjuangan atas nilai-nilai dan klaim atas status yang terbatas, kekuasaan dan sumber daya, konflik juga sebuah upaya yang bertujuan untuk menetralkan, melukai/menyakiti atau menyingkirkan lawan (Baron, 2004:1). Dalam konteks ini konflik berubah menjadi sebuah persaingan terbuka yang bersifat merusak karena tujuannya mencegah dan atau menyingkirkan pihak lain untuk mendapatkan hal-hal yang sama-sama diinginkan.

Dengan demikian konflik, dalam manifestasinya sebagai pertentangan dan dapat bereskalasi pada penyingkiran pihak lain, tidak semata-mata sebagai sebuah kegiatan untuk menguasai hal-hal yang sifatnya terbatas namun juga bermakna mengatasi persaingan dengan pihak lain melalui beragam cara yang menghambat, mencegah dan menyingkirkan pihak lain yang berlawanan. Padahal pada dasarnya konflik yang bermanifestasi dalam bentuk pertentangan dapat memiliki makna positif dan konstruktif yakni dengan mentransformasikan nilai-nilai yang bertentangan itu kepada hal yang baik, membebaskan serta sebagai katalis pembangunan yang berguna bagi kokohnya sistem demokrasi (Jeong, 2008:27). Sudah barang tentu konflik agar memiliki manfaat semacam ini harus dikelola menjadi konflik yang konstruktif.

Kebalikannya konflik yang destruktif terjadi manakala konflik dikelola dengan cara-cara merusak misalnya dengan kekerasan fisik pada pihak lawan sebagai upaya menarik pihak lawan dari persaingan yang dijalankan. Bentuk-bentuk konflik destruktif ini banyak ditemui dalam masyarakat seperti pengrusakan, pembakaran,

pembunuhan, penyiksaan yang mengakibatkan kerusakan moral, materiil dan kehilangan jiwa. Bahkan bisa jadi konflik yang destruktif ini mengembalikan dan memundurkan (*set back*) kondisi sosial dan ekonomi yang telah dicapai dengan susah-payah selama berpuluh-puluh tahun.

Merunut sumbernya, konflik bisa terjadi karena adanya ketersediaan informasi yang terbatas yang mengakibatkan kesalahan dalam menginterpretasikan, merespon dan mengambil keputusan atas suatu hal yang terjadi berkaitan dengan pencapaian tujuan. Hal yang umum terjadi dalam masyarakat yang sedang bertentangan ini ditandai dengan adanya informasi yang sepotong-sepotong yang dengan cepat direspon secara emosional sehingga justru menimbulkan konflik dan masalah yang lebih parah lagi.

Selain berkaitan dengan masalah informasi yang terbatas serta interpretasi yang kurang tepat, konflik juga dapat muncul karena adanya perbedaan nilai-nilai dan kesenjangan kekuasaan (Jenong, 2008: 27). Isu pokok yang melekat dengan hal ini adalah keadilan dan kesejahteraan sebagaimana termanifestasikan dalam hubungan antara rakyat dan pemerintahnya. Dalam persepsi rakyat, yang jumlahnya lebih banyak, muncul keluhan-keluhan seperti ekonomi yang semakin sulit, mencari pekerjaan yang semakin terbatas, fasilitas umum yang kurang bagus dan lain sebagainya. Sementara dalam persepsi pemerintah atau birokrasi mereka telah melakukan banyak hal yang diinginkan oleh rakyat dengan berbagai program seperti pembukaan balai latihan kerja, mengadakan bursa kerja, mendorong deregulasi ekonomi untuk memperbanyak serapan tenaga kerja serta penyediaan fasilitas umum yang layak. Pada satu sisi rakyat masih merasa kurang sejahtera bahkan tidak mendapatkan keadilan sementara pada sisi yang lain pemerintah berpandangan sebaliknya, sudah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi warga negaranya.

Isu keadilan dan kesejahteraan lebih bersifat personal atau individual dibandingkan dengan isu-isu ambisi penguasaan sumber daya ekonomi, politik serta penolakan terhadap minoritas yang lebih bersifat elitis. Sudah selayaknya isu personal dan elit ini dapat dikelola oleh negara sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Apabila isu personal dan elit ini bersinergi dengan isu etnis, agama dan identitas kelompok (di Indonesia lebih dikenal dengan SARA, kepanjangan dari Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), maka akan menjadi konflik yang sangat pelik pada level lokal, regional maupun nasional (Jeong, 2008: 27).

Oleh karena itu upaya untuk mempelajari, memahami dan menganalisa konflik dalam berbagai level dan bermacam isu sangat penting untuk dilakukan semata-mata untuk memberikan pandangan yang komprehensif atas berbagai hal di seputar konflik, seperti aktor, hubungan di antara paraaktor, isu-isu yang dimunculkan. Terdapat beberapa alat analisis yang dapat dipakai untuk memetakan sebuah konflik dan menyusun upaya resolusi maupunantisipasi bagi kepentingan di masa mendatang. Semua model analisis konflik sedapat mungkin merupakan hal-hal yang bersifat praktis, mudah disampaikan, dijelaskan dan diterima oleh siapa saja (Furlong, 2005: 38-39).

Model analisis yang dikembangkan oleh DFID lebih praktis dan fokus kepada 3 hal yakni struktur, aktor dan dinamika yang mana masing-masing memiliki variabel-variabel yang lebih mendalam. Model serupa dikembangkan oleh *Institute for Peace and Conflict Resolution*, sebuah lembaga masyarakat sipil internasional yang berupaya melakukan advokasi tentang konflik dan perdamaian, yakni berfokus pada profil konflik, sebab-sebab, aktor-aktor serta dinamika yang terjadi. Oleh

karena itu dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan analisis model DFID yang disempurnakan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Struktur, meliputi 3 hal yang akan dianalisis, yakni konteks konflik yang dimulai dengan data demografi serta sejarah dan kronologi konflik yang pernah ada; sumber konflik dapat dilacak dari beragam isu yang bisa dirunut mulai dari politik, keamanan, ekonomi dan sosial; adapun kunci utama/sumber konflik yang didapat melalui analisis multikoneksi atas hal-hal yang disebutkan sebelumnya.
- b. Aktor, dalam hal ini meliputi pihak-pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konflik, bisa berupa individu, kelompok maupun asosiasi atau lembaga yang masing-masing memiliki atribut berupa kepentingan, hubungan dengan aktor lain, kapasitas untuk mempengaruhi konflik, agenda perdamaian serta insentif yang ditawarkan bagi pihak-pihak lain.
- c. Dinamika, terdiri dari seperangkat daftar pendahulu konflik yakni analisa potensi konflik dalam jangka panjang dan pendek, pemicu/*trigger* yang berpotensi menaikkan atau menurunkan tensi konflik, faktor-faktor yang mempercepat atau memperlambat konflik, serta skenario yang mungkin dibangun pada masa mendatang (berupa analisa struktur, aktor, dinamika, skenario dan asumsi-asumsinya serta dasar perencanaan untuk masa mendatang).

A.3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami realitas konflik sosial yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan sifat penelitian kualitatif yang memiliki konteks dan *setting* alamiah, bertujuan mendapatkan pemahaman mendalam, teknik pengumpulan data yang khas tanpa adanya *treatment* serta fleksibel / mengikuti dinamika di lapangan (Herdiansyah, 2010: 10-13). Hal ini penting mengingat konflik juga bagian dari realitas sosial yang menarik untuk dikaji dan dianalisis guna memperoleh gambaran komprehensif sebagai dasar perencanaan di masa mendatang.

Kasus penistaan agama yang terjadi di Temanggung pada akhir tahun 2010 sampai dengan Februari 2011 akan menjadi unit analisis dalam penelitian ini dengan melibatkan para *stakeholder* konflik yang ada di Temanggung didukung oleh data-data sekunder yang relevan. Data dalam penelitian akan diperoleh melalui *indepth* dipadukan dengan *triangulasi data*, yakni wawancara pakar (akademisi di Temanggung) dan *stakeholder* (kyai dan tokoh masyarakat di Kec. Kranggan serta Pemerintah Kabupaten Temanggung) dilengkapi dengan *desk study* (kajian dokumen dan media berkait berita tentang kasus penistaan agama di Temanggung). Data akan dianalisa dengan terlebih dahulu dilakukan reduksi sesuai dengan alat analisa yang telah dijabarkan di atas (*clustering*/kategorisasi masalah-masalah struktur, aktor dan dinamika) kemudian diinterpretasikan menjadi sebuah gambaran umum yang luas yang terdiri dari skema-skema spesifik di dalamnya.

A.4. Hasil Penelitian

Dari data sekunder yang ada pada perpustakaan daerah Kabupaten Temanggung, terlihat bahwa karakteristik masyarakat Temanggung adalah masyarakat yang nirkonflik, yakni sampai dengan awal tahun 2011 belum pernah sekali pun konflik sosial yang berimplikasi merugikan secara masif, baik dari sisi material maupun menimbulkan guncangan sosial dan trauma.

Sejauh ini konflik yang muncul adalah konflik-konflik yang sifatnya temporer, karena satu sebab dan dapat diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh

pemerintah kabupaten. Konflik ini misalnya konflik berkisar pada masalah olah raga (konflik sepak bola di Stadion Bhumi Pala Temanggung tahun 1998) yang mana konflik hanya terjadi di dalam stadion serta tidak diikuti dengan aksi anarkis/pengrusakan. Selain itu ada pula konflik di birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2005 yakni Bupati (Totok Ari Prabowo) melakukan pembuatan kebijakan mutasi birokrasi yang kontroversial dan tidak berdasar hukum sehingga memicu keresahan dalam birokrasi. Konflik serupa yang dilakukan oleh aktor yang sama (bupati) adalah pembuatan kebijakan pengenaan sumbangan bagi komoditas tembakau yang sangat ditentang oleh para buruh dan petani tembakau di wilayah Kledung. Konflik berkaitan dengan pembayaran THR setiap menjelang lebaran juga terjadi namun dapat dimediasi dan diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui SKPD terkait.

Yang menarik, berkaitan dengan konflik agama yang terjadi, mayoritas informan menyatakan tidak pernah atau belum pernah ada, namun 3 informan menyatakan bahwa konflik agama ada dalam bentuk keresahan (tidak sampai kepada aksi atau tindakan fisik) karena adanya proses atau upaya penyebaran suatu agama minoritas dan pendirian tempat ibadah oleh pemeluk agama minoritas pada sebuah wilayah. Termasuk juga pendirian sekolah agama minoritas yang mengundang anak-anak pemeluk agama mayoritas untuk bersekolah dan mendapatkan beragam bantuan. Tindakan ini memicu keresahan dalam masyarakat dan dapat menjadi potensi konflik meski hanya dalam bentuk gerutu (bahasa Jawa: *nggrundhel*). Meski di antara pimpinan antarumat beragama di Temanggung sudah ada kesepakatan untuk *ngopeni umate dewe-dewe* (bahasa Indonesia : mengatur dan mengurus umatnya sendiri-sendiri), namun kadang masih ada tindakan pelanggaran dengan menyebarkan agama minoritas di wilayah pemeluk agama mayoritas melalui cara mendatangkan pendakwah dari Jakarta maupun luar negeri. Hal-hal semacam ini menurut para informan bisa menjadi bahaya laten konflik antaragama.

Selain itu ada hal yang menarik yakni konflik internal agama antara golongan mayoritas penduduk asli dengan golongan minoritas pendatang yang mengoreksi dan membawa praktik ibadah yang baru dengan mempertentangkannya dengan praktik ibadah yang selama ini dijalankan oleh penduduk asli mayoritas. Konflik ini pada sebuah wilayah (Bangsari, Parakan) sempat akan menjurus kepada tindakan anarkis yakni pengrusakan tempat ibadah yang dikuasai oleh kelompok minoritas pendatang baru. Namun dengan adanya mediasi dan pendampingan dari organisasi massa keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, aksi tersebut dapat dicegah. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pemahaman dan praktik ibadah yang dipertentangkan, yakni yang satu mengkritisi dan mengklaim lebih benar daripada yang lain.

Dalam konteks penelitian ini konflik adalah perbedaan dan pertentangan pendapat, nilai dan sumber daya antarindividu dan golongan yang termanifestasikan ke dalam bentuk perbedaan pendapat, perseteruan (polarisasi), perlawanan dan permusuhan namun dibatasi tidak sampai kepada upaya dan manifestasi konflik fisik antarpihak. Hal ini sangat penting untuk ditegaskan agar muncul kesepahaman konsep tentang konflik mengingat spektrum dan manifestasikan konflik yang sangat beragam dan kompleks, khususnya yang berkaitan dengan konflik antaragama. Lebih daripada itu penelitian ini diharapkan akan memberikan konstruksi konseptual bahwa konflik tidak selalu dimaknai dengan tindakan kekerasan fisik antarpihak berupa perilaku merusak/destruktif namun konflik sudah dapat diidentifikasi dan terjadi dalam tataran perbedaan ide, pandangan, perilaku serta prinsip.

B. PEMBAHASAN

B.1. Struktur Konflik

Struktur konflik berkaitan dengan 2 (dua) hal mendasar yakni konteks dan sumber konflik. Konteks konflik mencakup sejarah konflik, deskripsi dan kronologi konflik serta demografi wilayah konflik sedangkan sumber konflik ditandai dengan isu utama serta keterkaitan isu utama dengan aspek sosial politik dalam masyarakat.

Penyebab terjadinya konflik penistaan agama di Temanggung adalah tindakan penyebarluasan buku dan brosur yang menistakan agama Islam, Kristen dan Katholik yang dilakukan oleh ARB, warga Jakarta Timur pada 23 Oktober 2010. Tindakan penyebaran dengan meletakkan/melemparkan buku dan brosur di depan rumah warga di wilayah Kranggan, Temanggung dan pasar Kranggan telah mengundang reaksi keras dari para warga, baik dari kalangan Islam maupun Kristen dan Katholik. Para warga menilai bahwa tindakan ARB menistakan agama dan harus diproses melalui jalur hukum sehingga para warga sepakat melaporkan kasus ini kepada polisi (Polsek Kranggan) dengan menyerahkan ARB serta bukti-bukti berupa buku dan brosur yang berhasil dikumpulkan kembali.

Pada sidang I yang dilaksanakan tanggal 13 Januari 2011 tidak memberikan kesan sebagai kasus yang besar dan melibatkan banyak orang. Proses sidang sangat normatif dan berlangsung dengan lancar. Sidang II yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2011 mulai dihadiri oleh banyak massa bahkan mulai terlihat adanya konflik antara massa dengan terdakwa, yakni massa ingin menghakimi terdakwa. Pihak keamanan pun mulai memberikan perlindungan dan pengawalan ekstra terhadap terdakwa. Guna meningkatkan keamanan, pihak kepolisian melibatkan Pemuda Anshor dari ormas keagamaan NU serta Pemuda Muhammadiyah untuk membantu pengamanan jalannya sidang. Hal yang menonjol pada sidang ini adalah suasana mulai panas dengan adanya indikasi pengerahan massa dari kelompok yang tidak bisa diidentifikasi serta perilaku anarkis yakni pelemparan Lembaga Pemasarakatan Temanggung.

Dari perkembangan 2 sidang ini, mulai teridentifikasi bentuk-bentuk keresahan masyarakat yang nyata yakni keinginan agar terdakwa dihukum seberat-beratnya karena telah menistakan simbol-simbol agama. Kasus ini dalam perkembangannya menyita banyak perhatian masyarakat, bahkan orang yang jarang/tidak pernah sholat saja sampai marah dan *gregetan* ingin ikut menghukum ARB.

Menjelang sidang III tanggal 8 Februari 2011 pagi harinya mulai ada indikasi suasana bertambah panas dengan adanya informasi yang berkembang mengenai kemungkinan adanya aksi menyikapi vonis yang sesuai dengan KUHP kasus penistaan agama dihukum maksimal 5 tahun. Kabar berdatangnya kelompok massa yang tidak teridentifikasi juga muncul dari laporan orang-orang yang melihat massa dengan dialek yang berbeda dengan penduduk Temanggung serta berpenampilan spesifik, misalnya berjenggot, bercelana *congklang* serta menutup wajahnya dengan cadar.

Ketika sidang dimulai, ada kelompok massa yang berkumpul di depan pintu pagar Pengadilan Negeri Temanggung dan melakukan provokasi seperti menanamkan kebencian kepada aparat (tidak mau disentuh dan menunjukkan sikap permusuhan) serta mengeluarkan kata-kata kotor dan jorok kepada polisi dengan dialek yang berbeda dengan dialek asli Temanggung. Namun massa provokator ini tidak dapat diidentifikasi karena jumlah massa yang sangat besar.

Kerusuhan terjadi setelah hakim membacakan vonis terdakwa yakni 5 tahun yang direspon dengan kegaduhan massa karena tidak puas di dalam ruang sidang serta ketegangan karena pembatas antara pengunjung dan terdakwa rusak. Massa menjadi sangat gaduh dan keadaan tidak terkendali di dalam ruang sidang. Beberapa massa berusaha untuk keluar namun terdengar ada suara kaca jendela yang dipecahkan. Sementara itu di luar gedung kegaduhan massa semakin meningkat dan terjadi pelemparan batu ke arah polisi. Suasana menjadi kacau karena massa mulai melakukan pengrusakan kaca dan bentrok dengan polisi. Polisi membalas dengan tembakan gas air mata dan massa semakin brutal dengan membakar truk pengendali massa (DALMAS) polisi. Massa kemudian dikejar polisi dari arah timur menuju ke barat (arah masuk kota) dan massa mulai berhamburan ke arah kota dan mulai terdengar provokasi untuk membakar dan merusak gereja. Provokasi dilakukan dengan logat yang sangat beda dengan logat Temanggung ditambah dengan provokasi adanya anak kyai yang meninggal karena ditembak. Massa menjadi semakin tidak terkendali dan terjadi pengrusakan di beberapa tempat, yakni Pengadilan Negeri Temanggung, Pos Polisi Lalu Lintas di simpang tiga TELKOM, Gereja Santo Petrus, Pos Polisi Lalu Lintas di simpang tiga barat Pasar Temanggung, Gereja Pantekosta serta Sekolah Dasar/Griya Shekinah.

Isu utama dari konflik ini adalah penistaan agama yang dilakukan oleh ARB yang direspon oleh masyarakat luas meski upaya hukum telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam melakukan aksinya ARB terlihat sangat tenang menyebarkan buku dan brosur dan ketika ditanya maksud tujuannya ia dengan ramah menjawab hanya sebagai pengetahuan saja. Pembawaannya yang ramah dan kalem menimbulkan beragam praduga dan kecurigaan bahwa ARB sebenarnya orang yang sangat berpengalaman melakukan aksi-aksi ini karena ketika tertangkap basah ia tidak menunjukkan ekspresi bersalah atau ketakutan.

Motif dari konflik ini tidak bisa diketahui karena terdakwa (ARB) sangat normatif dan konsisten dalam memberikan jawaban, seolah sudah terprogram untuk melakukan tindakan semacam ini. Sudah barang tentu konflik ini sangat berkait dengan kondisi sosial masyarakat mengingat isu agama adalah hal yang sangat sensitif untuk memancing keresahan dan kerusuhan di dalam masyarakat.

B.2. Aktor Konflik

Aktor konflik meliputi pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik baik secara langsung maupun tidak langsung, kepentingan serta hubungan di antara mereka, kapasitas yang dimiliki serta insentif yang ditawarkan bagi perdamaian.

Dalam kasus ini pihak yang berkaitan secara langsung adalah terdakwa/ARB serta beberapa orang Islam, Kristen dan Katholik yang pertama kali mengungkap dan membawa kasus ini kepada penegak hukum/polisi. Hubungan di antara mereka, khususnya hubungan dengan ARB adalah antagonis/berlawanan karena perilaku yang telah dilakukan ARB mengganggu penghayatan keagamaan mereka dengan menistakan simbol-simbol agama, baik Islam, Kristen maupun Katholik. Mereka memiliki kepentingan mengeliminasi perilaku ARB agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih meluas dengan tindakan penyerahan ARB kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Secara jangka panjang tindakan ini akan menjaga kondisi tetap damai dan aman karena setiap masalah diselesaikan kepada penegak hukum.

Sedangkan kepentingan ARB sendiri tidak jelas karena tidak ada jawaban substantif yang diberikan. Jawaban yang keluar dari mulut ARB hanyalah jawaban normatif yang menimbulkan interpretasi umum dan tidak mengarah kepada maksud yang sesungguhnya. Banyak kecurigaan tentang konspirasi di balik sosok ARB, sesuatu yang semestinya ditindaklanjuti oleh polisi dan diungkapkan kepada publik.

Adapun aktor-aktor yang tidak langsung dalam kasus ini adalah para tokoh ormas agama, kelompok masyarakat sipil (FUIB, FKUB, NU, Muhammadiyah, Paroki) serta Pemerintah Kabupaten Temanggung yang secara jelas memiliki kepentingan untuk menangani kasus ini dengan baik tanpa dampak destruktif serta membawa kepentingan insentif perdamaian jangka panjang. Aktor-aktor tidak langsung ini telah berupaya secara optimal dengan usaha dan jejaring yang dimiliki untuk meredam dampak konflik yang diprediksikan muncul. Mereka membangun hubungan dan kontak yang erat dan bersepakat menghadapi masalah ini bersama-sama. Hal ini terbukti pada saat selesai kerusuhan para aktor ini dengan jejaringnya sampai di tingkat nasional melakukan upaya-upaya mengembalikan situasi dan menata kembali sisa-sisa kerusuhan. Mereka memiliki kesepakatan agenda perdamaian bahwa kondisi ini harus ditangani dan ditanggulangi bersama agar di masa mendatang hal seperti ini tidak terjadi lagi.

Secara khusus Pemerintah Kabupaten Temanggung di bawah pimpinan bupati telah melakukan tindakan-tindakan kuratif dan antisipatif agar hal semacam ini tidak terjadi lagi di Temanggung. Upaya yang menghabiskan banyak sumber daya (anggaran, tenaga dan waktu) ini terbukti secara efektif mengembalikan kondisi Temanggung ke arah kondisi yang damai dan tenang.

Namun demikian munculnya massa yang melakukan berbagai tindakan provokatif tanpa bisa diidentifikasi, diatasi dan dijelaskan kepentingan dan insentifnya membuat konflik ini, khususnya kerusuhan yang terjadi karenanya, sangat sulit untuk dianalisis. Tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan mendorong konflik bermanifestasi menjadi kerusuhan dan pengrusakan yang dilakukan oleh massa terhadap obyek-obyek yang tidak berkaitan dengan substansi konflik. Kerusuhan dan pengrusakan berlangsung sangat cepat dan semua pihak, termasuk polisi tidak dapat mengidentifikasi provokator kerusuhan dan pengrusakan.

Para terdakwa yang ditangkap polisi dan diproses secara hukum sampai dengan menjalani hukuman penjara adalah orang-orang yang terprovokasi karena niat sejak awal meninggalkan rumah hanya menyaksikan sidang, tanpa adanya rencana dan indikasi persiapan melakukan kerusuhan dan pengrusakan. Sinyalemen ini sependapat dengan informasi yang disampaikan oleh para informan bahwa ada keganjilan tentang kejadian kerusuhan, yakni tentang ban yang dibakar di depan Pengadilan Negeri Temanggung (tidak diketahui asal-usulnya), orang-orang yang menyulut petasan, provokasi yang menghina dan merendahkan aparat (polisi), baik berupa sikap, perkataan maupun tindakan, provokasi informasi ada anak kyai yang tertembak serta massa yang sulit diidentifikasi sebagai orang Temanggung dari dialek dan pakaiannya.

Keanehan tersebut tidak terungkap sampai dengan saat ini sama halnya dengan motif pelaku/ARB yang menyebarkan dokumen penistaan agama. Semestinya aparat hukum bisa menuntaskan kasus ini dengan memaparkan kronologis, aktor, motif serta penggunaan sumber daya untuk melakukan aksi tersebut. Transparansi penanganan kasus ini akan mempermudah penyelesaian konflik karena semua pihak mendapatkan informasi yang komprehensif tentang pelaku konflik (ARB) maupun pelaku dan provokator kerusuhan yang datanya menjadi perbincangan masyarakat luas.

Pelaku provokator kerusuhan menurut semua informan harus diungkap karena tidak mungkin provokasi ini dilakukan oleh orang Temanggung. Dengan bahasa yang lebih lugas masak orang Temanggung tega merusak daerahnya sendiri? Pernyataan ini juga didukung bukti-bukti adanya massa yang tidak teridentifikasi dengan jelas dari luar daerah, dibuktikan dengan sikap, tindakan dan dialek yang bukan ciri orang Temanggung serta banyaknya kendaraan bernomor luar Temanggung pada saat kerusuhan terjadi. Terlebih tidak adanya pihak yang mendeklarasikan diri melakukan aksi-aksi rusuh dengan ideologi atau agendanya membuat kasus konflik dan kerusuhan ini menghadapi jalan buntu. Bagi sebagian kalangan, khususnya informan penelitian ini, ada persepsi permisif untuk melupakan begitu saja konflik dan kerusuhan ini tanpa adanya keinginan untuk menggali dan mempelajari pembelajaran di balik kejadian kerusuhan dan konflik tersebut.

Dengan demikian, aktor-aktor di luar ARB dan massa dapat dipastikan motif, kepentingan dan kapasitasnya terhadap konflik yang terjadi. Berkaitan dengan ARB dan massa, pihak yang menginginkan konflik ini selesai dengan tuntas mesti melakukan penyelidikan dan penelitian lagi guna menemukan motif, kepentingan dan kapasitasnya.

B.3. Dinamika Konflik

Dinamika konflik berkaitan dengan faktor di seputar konflik (potensi durasi konflik, pemicu eskalasi atau deskalasi konflik serta faktor yang mempercepat atau memperlambat konflik) serta skenario yang dapat dibangun, yakni berkaitan dengan skenario yang mungkin dijalankan, resiko dan asumsi yang melatarbelakanginya.

Mencermati kasus konflik dan kerusuhan Temanggung dapat diketahui bahwa secara nyata durasi kerusuhan hanya 1-2 jam saja, namun durasi konflik bisa jadi lebih lama mengingat vonis pengadilan terhadap terdakwa penistaan agama menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Terlebih dengan adanya kerusuhan menambah penderitaan dan menimbulkan asumsi-asumsi negatif serta kecurigaan antara satu pihak dengan pihak lain.

Ranah ini sangat sensitif bahkan dalam penelitian ini sampai ada pihak yang keberatan untuk mendiskusikan dan menjadi informan karena khawatir dengan akibat yang tidak diinginkan. Beberapa informan juga agak tertutup untuk mendiskusikan dinamika konflik ini, khususnya yang berkaitan dengan skenario, resiko dan asumsi.

Mengingat konflik ini diputuskan dengan terpaksa (adanya vonis hakim, kerusuhan dan terdakwa yang diamankan ke luar Temanggung) maka dinamika konflik ini tidak dapat dideskripsikan secara lebih detail. Yang muncul kemudian adalah pernyataan-pernyataan normatif tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak, yakni *cooling down* dan antisipatif, baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil, ormas keagamaan maupun Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Banyak pihak berusaha untuk menutup rapat dan melupakan konflik serta kerusuhan ini serta mengajak untuk melihat ke depan dan menjaga atau mencegah agar kejadian serupa ini tidak terulang. Ajakan ini disertai dengan upaya-upaya penyuluhan hukum oleh pemerintah serta pengajian dan pembinaan umat. Pendekatan atas konflik yang seperti ini nampaknya lazim dilakukan seperti tercermin dari sebuah ungkapan Jawa .. *sing uwis yo uwis! Sudahlah, yang sudah terjadi biarkan saja*. Upaya ini bisa saja berhasil meredam konflik dalam jangka pendek namun ketidakjelasan skenario, motif dan resiko menyelesaikan konflik bisa jadi memicu konflik jangka panjang, sebab pendekatan konflik yang emosional dan rasional akan memberikan hasil yang berbeda. Sebagaimana telah diuraikan oleh

Jeong pada bagian terdahulu bahwa konflik bisa bermakna konstruktif bagi sebuah masyarakat dan demokrasi manakala pihak-pihak yang berkepentingan memiliki kemauan dan kemampuan mentransformasikan konflik ke dalam bentuk yang positif. Sudah barang tentu untuk mencapai upaya ini dibutuhkan persepsi yang positif terhadap konflik, yakni melihat konflik secara rasional ketimbang secara emosional.

Mengkaji dan memahami dinamika konflik membutuhkan energi, kesadaran dan pemikiran bahwa konflik bukanlah sebuah hal yang tabu dan rahasia untuk didiskusikan guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Keterbukaan dan kesediaan berbagi antarpihak sangat diperlukan untuk merumuskan skenario, resiko dan asumsinya. Pandangan yang teknokratis ini perlu menjadi sebuah alternatif solusi untuk menyelesaikan konflik secara tuntas atau membangun sinergi konstruktif atas konflik yang telah terjadi. Dalam kasus ini diskusi tentang dinamika konflik tidak dapat dieksplorasi karena hal-hal yang bersifat normatif dan deskriptif sebagai respon atas konflik dan kerusakan yang terjadi.

C. PENUTUP

C.1. Simpulan

Berdasarkan model analisis yang telah dipilih dalam perencanaan penelitian ini maka berkaitan dengan konflik di Temanggung yang disertai dengan kerusakan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyebab atau sumber konflik adalah tindakan yang berurutan, yakni penistaan agama oleh ARB yang direspons dengan ketidakpuasan massa atas vonis hakim terhadap ARB dan ditambah dengan provokasi pihak-pihak tertentu dari luar Temanggung yang tidak bisa diidentifikasi dengan jelas. Konflik ini bukan konflik antaragama dan tidak didahului dengan potensi konflik, artinya konflik dan kerusakan yang menyertainya terjadi secara spontan.
- b. Pelaku kerusakan terprovokasi oleh provokator yang berasal dari luar Temanggung yang dapat diidentifikasi dari logat dan sikap antipati yang berlebihan terhadap aparat keamanan (polisi). Identifikasi ini bertolak belakang dengan karakter masyarakat Temanggung.
- c. Motif dari konflik ini tidak bisa diketahui dengan jelas karena terdakwa (ARB) sangat normatif dan konsisten dalam memberikan jawaban, seolah sudah terprogram untuk melakukan tindakan semacam ini. Terdakwa (ARB) dan massa tidak dapat dianalisis dan diketahui motifnya secara jelas sehingga sulit untuk memahami konflik ini secara komprehensif.
- d. Mengingat konflik ini diputuskan dengan terpaksa (adanya vonis hakim, kerusakan dan terdakwa yang diamankan keluar Temanggung tanpa tindak lanjut yang jelas dan transparan di hadapan publik) maka dinamika konflik, berkaitan dengan skenario, resiko dan asumsi, tidak dapat dideskripsikan secara lebih detail. Pernyataan normatif dan deskriptif tidak bisa menjelaskan dinamika konflik secara operasional.
- e. Skenario yang mungkin dilakukan untuk mengakhiri konflik ini kurang terdeskripsi dan terancang secara jelas karena yang dilakukan oleh pihak yang berwenang adalah tindakan normatif berupa penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah hal serupa muncul kembali. Tidak diketemukan adanya desain untuk mengakhiri konflik secara sistematis dan transparan.

C.2. Saran

Dari serangkaian kegiatan dan hasil penelitian ini serta berdasarkan kesimpulan yang dibuat, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Perlu adanya penelitian yang lebih mendetail untuk menjelaskan konflik dan kerusuhan yang terjadi di Temanggung pada tanggal 8 Februari 2011 yang dapat dilakukan oleh pemerintah, kepolisian maupun masyarakat sipil guna mengungkap fakta-fakta yang masih kabur berkaitan dengan motif terdakwa, identifikasi massa dari luar Temanggung serta skenario, resiko dan asumsi penyelesaian konflik.
- b. Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu mendokumentasikan konflik dan kerusuhan yang terjadi secara sistematis sehingga dapat menjadi model pembelajaran pengelolaan konflik serta kerusuhan yang mungkin timbul menyertainya.
- c. Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu menindaklanjuti dengan membuat peta konflik, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antarumat beragama. Hal ini sangat penting dan perlu untuk menjaga agar potensi konflik jangka panjang dengan dampak yang lebih besar tidak muncul mengingat agama dapat menjadi komoditas yang menarik untuk menciptakan *chaos* dalam masyarakat.
- d. Model analisa konflik yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengadopsi dari DFID perlu disesuaikan dan disederhanakan dengan konteks konflik. Model asli DFID sangat cocok digunakan untuk menganalisa konflik jangka panjang, sementara konflik yang diteliti dalam penelitian ini bersifat temporer/sangat singkat.
- e. Peneliti yang tertarik dengan kajian tentang konflik perlu berhati-hati dan menyiapkan strategi untuk memilih metodologi pengumpulan data mengingat model pengumpulan data dengan cara wawancara tidak mudah dilakukan dan tidak mudah mendapatkan hasil sesuai dengan harapan dan tujuan penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Axt, Heinz-Jurgen. (2006). Conflict, A Literature Review. *Research Report*. Institute for Political Science University of Duisburg-Essen.
- Barron, Patrick, Smith, Claire Q, Woolcock, Michael. (2004) Understanding Local Level Conflict in Developing Countries: Theory, Evidence, and Implications from Indonesia. *Research Report*. Social Development Department, The World Bank.
- Berhe, Tadesse dan Adaye Yonas. Tanpa tahun. Afar: The Impact of Local Conflict on Regional Stability. *Research Report*. Centre for Policy Research Dialogue (CPRD) dan Institute Security Studies (ISS).
- Bertrand, Jacques. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Choppel, Charles (Eds.) (2006). *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution*. London: Routledge.
- Furlong, Gary T.(2005). *The Conflict Resolution Toolbox: Models and Maps for Analyzing, Diagnosing and Resolving Conflict*. Ontario, John Wiley and Sons Canada, Ltd. Hal 38-39.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta, Penerbit Salemba Humanika.
- Institute for Peace and Conflict Resolution. (2002). Conflict Analysis. *Conflict-sensitive Approaches to Development, Humanitarian Assistance, and Peace Building: Tools for Peace and Conflict Impact Assessment*.
- Jeong, Ho-Won. (2008). *Understanding Conflict and Conflict Analysis*, London: SAGE Publication.
- Shiva, Vandana. (2002). *Water Wars: Privatization, Pollution and Profit*. Cambridge, South End Press.
- www.dfid.gov.uk diakses pada 26 April 2011 Pukul 08.58 WIB.
- www.voa-islam.com/news diakses pada 20 April 2011 pukul 07.54 WIB.
- Buku Putih Terkait Kerusuhan di Temanggung Selasa, 8 Februari 2011* yang dikeluarkan oleh Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Temanggung.
- Panggilan untuk Menata Kehidupan Bersama Berangkat dari Peristiwa Temanggung*, 15 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Tim Temanggung Damai Keuskupan Agung Semarang.

